

LAPORAN KINERJA (LKJ)

TRIWULAN III

▶ 2021

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian kinerja ke depan sebagaimana yang telah Ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2021.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan disampaikan kepada pimpinan.



Bitung, 14 Oktober 2021

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Donny Muhammad Faisal, S.St.Pi, S.Pi, M.Si

NIP. 19790502 200212 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah Ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2021.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2021 terdapat 7 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung kemudian mengalami revisi dan refocusing anggaran pada triwulan ke-II sehingga Indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menjadi 19 Indikator Kinerja. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 7 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 112 %. Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 11 Indikator Kinerja dapat tercapai Hijau dan 8 indikator Kinerja belum dapat dinilai karena akan di ukur capaian kerjanya pada Triwulan IV tahun 2021.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan (2350), Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebesar Rp34,49 miliar dengan realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 2021 Rp24,40 miliar atau 70,93%.

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III tahun 2021 kiranya mampu menggambarkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 beserta capaiannya baik kinerja maupun anggaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan ke depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	1
1.4 Tugas dan Fungsi	2
1.5 Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024	8
2.2 Rencana Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021	15
3.2 Analisis Capaian Kinerja	17
3.3 Akuntabilitas Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Rekomendasi	52

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021	12
Tabel 2	Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2021	15
Tabel 3	Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III 2021	18
Tabel 4	Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021	18
Tabel 5	Hasil pengawasan Unit Usaha yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak Triwulan III tahun 2021 lingkup Pangkalan Bitung	24
Tabel 6	Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021	26
Tabel 7	Rincian Pemeriksaan Unit Pengolahan Ikan pada triwulan III Tahun 2021	27
Tabel 8	Rincian Pemeriksaan Unit Usaha yang melakukan Distribusi triwulan III Tahun 2021	28
Tabel 9	Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya melalui Simwaskon lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021	30
Tabel 10	Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya Tidak Melalui Simwaskon (Manual) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021	30
Tabel 11	Rincian Pemeriksaan Unit Usaha Pembudidayaan Ikan pada Triwulan III Tahun 2021	31
Tabel 12	Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan III Tahun 2021	37
Tabel 13	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021	38
Tabel 14	Penanganan TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021	40
Tabel 15	Penanganan Barang Bukti TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021	41
Tabel 16	Penanganan AWAK KAPAL di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021	43
Tabel 17	Hasil Survey IKM SLO TW III Tahun 2021	47
Tabel 18	Hasil Survey IKM LVHPI TW III Tahun 2021	48
Tabel 19	Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan III Tahun 2021	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	4
Gambar 2	Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	5
Gambar 3	Lokasi Tempat Penangkapan Ikan dengan Handak di Desa Pitu Lua, Dusun Labuan Dala Kecamatan Lasusua.	35
Gambar 4	Peninjauan Lapangan/Pemetaan Lokasi yang Menjadi Daerah Rawan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan)	36
Gambar 5	Keterangan Penanggulangan Destructive Fishing dari Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara, Pengawas WP3K, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	36
Gambar 6	Wawancara dengan Kepala Desa Kasumeeto Kecamatan Pakue Terkait Maraknya Kegiatan <i>Destructive Fishing</i>	37

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah Ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang Ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Triwulan III tahun 2021 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis bidang perikanan tangkap, meliputi
 - a. Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi.
 - b. Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan lain sebagainya.
2. Isu strategis bidang perikanan budidaya, meliputi:
 - a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
 - b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
 - c. Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
3. Isu strategis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan ekspor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional.
 - b. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
4. Isu strategis bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.
 - b. Eksploitasi mangrove.
 - c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah Ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a. Kepala Pangkalan

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

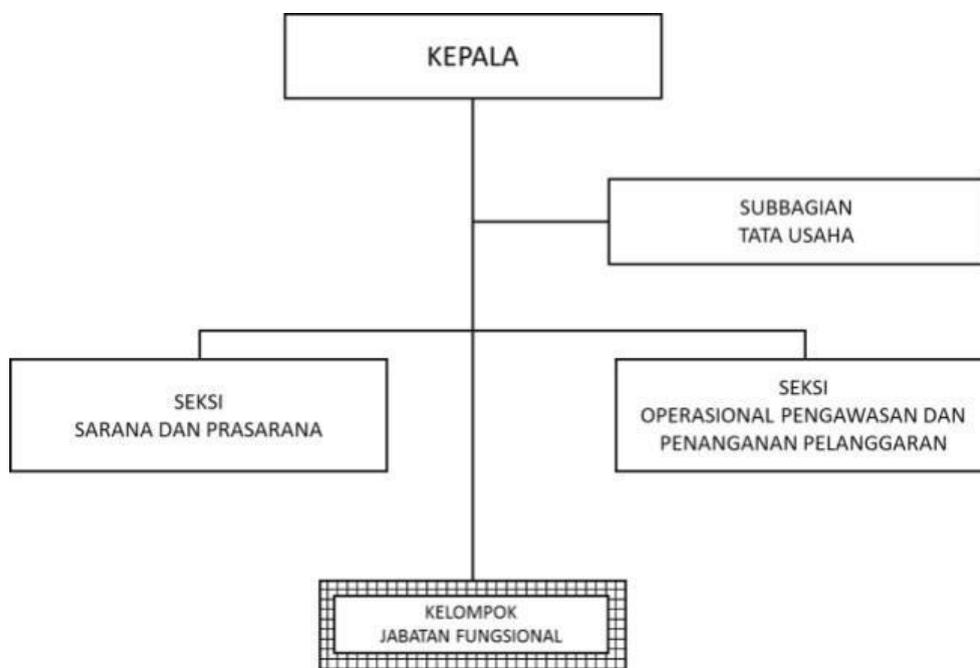
d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsional pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah Ditetapkan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung



Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi,

Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP 31 Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian :

- a. Pangkalan PSDKP Bitung, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Labuan Uki, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.
- b. Satwas SDKP Gorontalo, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
- c. Satwas SDKP Kendari, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.
- d. Satwas SDKP Gorontalo Utara, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.
- e. Satwas SDKP Makassar, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.
- f. Satwas SDKP Takalar, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
- g. Satwas SDKP Mamuju, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP PolewaliMandar.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2021 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021;

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021; dan
4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 dan rekomendasi perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2019-24 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam RenstraKKP 2020 - 2024.

Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PSDKP

1. Visi

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab”

2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi Direktorat Jenderal PSDKP sekaligus penterjemahan tujuan di dalam Renstra KKP 2020-2024 maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP akan sangat berkaitan dengan salah satu aspek pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu aspek kedaulatan (*sovereignty*) dengan fokus pada: “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Ditetapkan sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2019-2024 melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *balanced scorecard (BSC)* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan

pengukuran kinerja. Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit Eselon I) yang menghasilkan hasil (outcome), dan sasaran kegiatan (unit Eselon II) yang menghasilkan keluaran (output).

Jika menggunakan pendekatan tersebut maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP; dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif

Di sisi lain, pendekatan *balanced scorecard* (BSC) adalah suatu konsep manajemen dalam pengukuran kinerja secara terukur (kuantitatif), utuh dan seimbang pada berbagai perpektif, jangka waktu, dan ruang lingkup. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learn and growth perspective*. Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan BSC maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Stakeholder perspective: "Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan".
- b. Customer perspective: "Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan".
- c. Internal Process perspective
 - 1) Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif;
 - 2) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif.
- d. Learning and growth perspective
 - 1) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang profesional dan berintegritas;
 - 2) Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses;
 - 3) Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
 - 4) Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel.

5. Peta Strategi dan Sasaran Strategis

Peta strategi merupakan sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki beberapa perspektif, yaitu suatu cara pandang untuk mengelola kinerja organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC KKP yaitu:

a. *Perspektif Stakeholder*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Yang dimaksud dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.

b. *Perspektif Customer*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *Customer*. *Customer* (pengguna layanan) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

c. *Perspektif Internal Process*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (value chain).

d. *Perspektif Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran strategis merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Sasaran strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan penjabaran visi dan misi Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2021 yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, dengan lingkup Kegiatan, meliputi:

1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Kelompok Masyarakat
 - b. Operasi Kapal Pengawas
 - c. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
 - d. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat
 - e. Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tingkat Daerah
 - b. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - a. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
 - b. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya.
 - c. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
 - d. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
 - e. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
 - f. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
 - a. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - b. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - c. Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - d. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang diperiksa kepatuhannya
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - a. Layanan Perkantoran
 - b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 - c. Layanan Umum
 - d. Layanan Sarana Internal
 - e. Layanan SDM
 - f. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah Ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk: menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinuous improvement*); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Revisi ke-6 Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	1,79
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,42

5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	7. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		8. Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik	9. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		11. Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	75
		12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	73
		13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90
		14. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (inovasi)	1
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5
		16. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	72.5
		17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	84
		18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	89
		19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	86

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)

Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.

2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI *gaming*).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi *Aplikasi Kinerjaku* yang merupakan *aplikasi* berbasis informasi teknologi.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 112 Terdapat 19 Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 11 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) 8 Indikator Kinerja belum dapat diukur karena akan diukur capaian kinerjanya pada Triwulan IV ditahun 2021. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, sebagaimana yang ada pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2021	TW III	TW III	
S.01	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan						120.00
IKS.01.01	Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	95	75	100	120.00
S.02	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan						100.00
IKS.02.01	Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	100	100	100	100.00
S.03	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat						120.00
IKS.03.01	Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	71	71	100	120.00
S.04	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP						118.75
IKS.04.01	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	1,79	1,07	1,89	120.00
IKS.04.02	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	0,42	0,4	0,47	117.50
S.05	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP						100.00
IKS.05.02	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	100	0	0	100.00
S.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan						113.42

IKS.06.01	Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	93	65	99,03	120.00
IKS.06.02	Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	93	93	99,36	106.84
S.07	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung						111.85
IKS.07.10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	89	0		
IKS.07.11	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	86	0		
IKS.07.01	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INDEKS	Maximize	80	80	88,68	110.85
IKS.07.02	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INDEKS	Maximize	80	80	86,43	108.04
IKS.07.03	Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	75	0		
IKS.07.04	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	73	0		
IKS.07.05	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	90	0		
IKS.07.06	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	INOVASI	Maximize	1	0		
IKS.07.07	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	72,5	0		
IKS.07.08	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	72,5	0		
IKS.07.09	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	84	84	99,33	118.25

(kinerjaku.kkp.go.id tanggal 14 Oktober 2021)

Warna	Keterangan
Baik	≥ 100
Cukup	$70 - < 100$
Kurang	< 70
Belum ada penilaian	
Belum Input Capaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan III tahun 2021, telah dilakukan pengukuran terhadap 11 (dua belas) indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, 11 indikator kinerja yang capaiannya $\geq 100\%$ target kinerja pada Triwulan III dan 8 (delapan) indikator kinerja Pangkalan PSDKP Bitung belum dilaksanakan pengukuran capaiannya.

Capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2020. Capaian skor kinerja Triwulan III tahun 2021 adalah 112% mengalami kenaikan 17,95% dari 94,05% pada Triwulan III tahun 2020.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja tahun 2021 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1:

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

Capaian Sasaran Kegiatan (SS) 1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan didukung dengan IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada Triwulan III tahun 2021 adalah 120%.

IKU1 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Target penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan pada Triwulan III tahun 2021 adalah 75%, tercapai 100% dengan presentase capaian kinerja 120% (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 472.514.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 297.628.750 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 62,99 %.

Tabel 3. Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III 2021

Indikator Kinerja	Satuan	2021	
		Target	Realisasi
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	persentase	75%	100%

Capaian ini merupakan hasil agregasi capaian 6 (enam) kegiatan pengawasan, meliputi:

- Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi
- Pengawasan pengelolaan jasa kelautan
- Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan
- Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi
- Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Jumlah Lembaga yang diperiksa	Presentase Capaian Pemeriksaan Triwulan III
1.	Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi	3	100
2.	Pengawasan pengelolaan jasa kelautan	2	100
3.	Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut	3	100
4.	Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan	4	100
5.	Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi	0	0
6.	Pengawasan <i>destructive fishing</i>	22	100
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung		32 (Lembaga)	100

Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja di Triwulan III tahun 2021, sebagai berikut:

1. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung sampai dengan Triwulan III 2021 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Triwulan III yaitu pengawasan terhadap :

- a. CV. Semangat Kawan Sejati Baru merupakan unit pengumpul dan penampung sirip ikan hiu kering (Dried Shark Wings). CV tersebut beralamat di Jl. Buru No 46 Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan didapati bahwa CV. Semangat Kawan Sejati Baru memiliki dokumen perizinan meliputi SIUP, HACCP, SIPJI perdagangan dalam negeri dan SIPJI perdagangan luar negeri dan memiliki kuota ekspor jenis ikan dilindungi berdasarkan SK Dirjen PRL no. 49 Tahun 2021 Tentang jenis ikan yang dilindungi.
- b. UD. Karya Nelayan merupakan unit pengumpul, penampung, pengolah dan pemasaran sirip ikan hiu. Beralamat di Jl. Barukang Utara no 26 Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan didapati bahwa UD. Karya Nelayan telah memiliki SIUP dan NIB serta adanya kesesuaian antara dokumen perizinan dengan jenis ikan yang diolah.
- c. CV. Ciputri Prakarsa Utama merupakan unit pengumpul, penampungan, dan pemasaran sirip ikan hiu. Beralamat di Jl. Veteran Utama Lt.98 No 5. Kel. Wajo Baru Kec. Bontoala Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan didapati bahwa CV. Ciputri Prakarsa Utama telah memiliki SIUP dan NIB serta adanya kesesuaian antara dokumen perizinan dengan jenis ikan yang diolah.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 29.836.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 18.916.250 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 63.40%.

2. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya

Kegiatan Pengawasan terhadap pengelolaan produk dan jasa kelautan dilingkup Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari dua kegiatan yaitu pengawasan pelaku usaha produk kelautan yang terdiri dari kegiatan pengawasan pelaku usaha pasir laut dan usaha garam, sementara untuk pengawasan jasa kelautan terdiri dari dua kegiatan yaitu pengawasan usaha wisata bahari dan pengawasan BMKT.

- a. Pada triwulan III telah dilaksanakan pengawasan terhadap 1 (satu) pelaku usaha produk kelautan yaitu pengawasan pelaku usaha garam, Pengawasan terhadap pelaku usaha Pengolahan dan penjualan Garam konsumsi beryodium dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021 yaitu Kelompok Usaha Garam Usaha Lestari yang beralamat di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Bontomarannu-Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Prov.Sulawesi Selatan hasil dari pemeriksaan kelompok usaha tersebut telah memiliki izin usaha perdagangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bontomarannu. .
- b. Pada triwulan III telah dilakukan pengawasan pengelolaan jasa kelautan yaitu pengawasan terhadap dua objek BMKT yang berada di Perairan Kepulauan Selayar dan berada di Wilayah Kerja PSDKP Selayar.
 1. Kegiatan pengawasan BMKT di Perairan Taka Bajangan Desa Bontolebang Kec.Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar adalah merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan tahun-tahun sebelumnya dimana ditemukan 4 buah jangkar ukuran raksasa dan 1 buah meriam. Jangkar raksasa dan meriam tersebut berada di Taka Bajangan pada koordinat S06°05.405' E120°21.550'. Spekulasi di media lokal Selayar tentang keberadaan 4 buah Jangkar Raksasa tersebut menyebutkan bahwa jangkar tersebut merupakan bagian dari kapal milik perusahaan Hindia Timur Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang karam di lokasi itu. Kapal yang diperkirakan karam di lokasi itu adalah kapal Walvis (Walvisch) yang tenggelam pada tanggal 07 Januari 1663. Kapal Walvis ini melegenda karena muncul dalam Perjanjian Bungaya antara Sultan Hasanuddin dan Gubernur Cornelis Speelman yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 dimana isinya bahwa "Seluruh alat-alat, meriam, uang dan barang-barang yang masih tersisa yang diambil dari kapal Walvisch di Selayar harus diserahkan kepada Kompeni. Kegiatan dilaksanakan guna mendokumentasikan kondisi terkini BMKT di dasar perairan serta melakukan penyisiran disekitar lokasi ditemukannya jangkar raksasa untuk mengetahui ada atau tidaknya objek lain termasuk bangkai kapal di sekitar jangkar tersebut. Selain itu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal yang melakukan aktivitas di sekitar lokasi BMKT. Jangkar raksasa yang ditemukan di perairan Taka Bajangan Desa Bontolebang Kec.Bontoharu Kab.Kep.Selayar sudah dalam kondisi ditumbuhi oleh karang, sehingga jika tidak diperhatikan secara teliti maka sulit untuk mengenali objek. Hasil kegiatan pengawasan dan inventarisasi objek di lokasi BMKT diperoleh data bahwa 4 buah jangkar raksasa dalam kondisi terjaga atau lengkap dan posisi tidak berubah. Selain

empat buah jangkar raksasa, di lokasi tersebut juga terdapat objek lain berupa satu buah meriam. Upaya penyelam untuk mencari tanda-tanda keberadaan kapal termasuk rantai jangkar yang menurut informasi bahwa nelayan pernah melihat rantai jangkar tersebut terus dilakukan namun belum membuahkan hasil. Kecepatan arus yang cukup tinggi menyulitkan tim penyelam dalam melakukan pencarian kemungkinan adanya objek lain di sekitar lokasi tersebut.

2. Pengawasan BMKT di Perairan Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu BMKT di perairan Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu berada pada koordinat LS 06°14'43" BT 120°26'14". BMKT tersebut berada pada kedalaman 21-23 M dan dalam kondisi hampir seluruhnya sudah tertimbun pasir dan lumpur dengan kisaran kedalaman 0,5 s.d 2 M dari permukaan dasar perairan. BMKT tersebut mulai diketahui keberadaannya pada Desember 2004. Berdasarkan data berbagai sumber, dapat diketahui bahwa Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) di sekitar perairan Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar berasal dari peninggalan Dinasty Sung China (864 tahun yang lalu). Sejarah perjalanan Dinasty Sung dimulai sejak jatuhnya Kerajaan Five Dynasty (907-960) di Utara dan Kerajaan The Ten Kingdom di Selatan China, dimana Sung dibagi menjadi 2 periode yaitu Northern Sung yang beribukota di Kai Feng dengan rajanya bernama Emperor Hui Zong (1101-1126) dan Southern Sung yang beribukota di Hong Zhun dengan Rajanya yang bernama Emperor Gao Zong (1127-1163). Dalam perjalanan sejarahnya, Dinasty Sung mengawasi kegiatan perdagangannya dengan mengadakan perdagangan antar kerajaan, khususnya kerajaan-kerajaan di Selatan China. Pada masa itu akses perdagangan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal layar untuk membawa barang-barang perdagangan diantaranya adalah keramik. Jalur lain yang digunakan yaitu dengan menempuh jalur laut antara India/Asia Selatan yang akhirnya sampai ke Makassar termasuk Selayar.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 72,000,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 47.810.900, dan realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 66,40%.

3. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Telah dilakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut pada Triwulan III 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- **Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir**

Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir pada tanggal 09 September 2021 di lokasi Ekowisata Mangrove yang beralamat di desa Budo kecamatan Wori, kabupaten Minahasa Utara. Jenis usaha wisata hutan mangrove, hasil dari pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa objek wisata tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Budo, pada saat pemeriksaan oleh petugas, pengelola menjelaskan bahwa dokumen perizinan masih dalam proses pengurusan ke dinas terkait. Kegiatan ekowisata tersebut tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

- **Pengawasan unit usaha pengelolaan ruang laut nasional**

Telah dilaksanakan pengawasan terhadap 2 (Dua) pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional dilingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III 2021 sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 13 September 2021 di PT. Pantai Indah Tatel (Mercure Tateli Resort) yang beralamat di Desa Tateli, Kel. Tateli Kec. Mandolaang Kab. Minahasa. Jenis usaha perhotelan, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
2. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 14 September 2021 di Ranowangko Beach Resort yang beralamat di Desa Ranowangko II, Kec. Kombi, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Jenis usaha resort dan wisata pantai, belum memiliki dokumen perizinan.

- **Pengawasan Pelaku Usaha Pulau Pulau Kecil**

Pada triwulan III Pangkalan PSDKP Bitung tidak melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 68.100.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp33.713.000, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 49,50%.

4. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Hasil kegiatan pada Triwulan III 2021 ini telah dilaksanakan pengawasan terhadap 4 (empat) unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungan dengan sebagai berikut :

1. Pengawasan unit usaha pengolahan kelapa PT. Sasa Inti pada tanggal 09 Agustus 2021 yang beralamat di Desa Radey, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan (: 1°10'18.5"N 124°27'14.3"E). dari hasil pemeriksaan perusahaan ini telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
2. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan CV. Karya Bitung pada tanggal 16 September 2021 yang beralamat di Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kab Minahasa Utara, Sulawesi Utara (1°24'10.8"N 125°03'55.5"E). Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
3. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Chen Woo Fishery pada tanggal 16 September 2021 yang beralamat di Jl Worang Bypass, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kab Minahasa Utara, Sulawesi Utara (1°23'57.1"N 125°01'28.3"E). Telah memiliki dokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
4. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Ken Jaya Perkasa pada tanggal 16 September 2021 yang beralamat di Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kab Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Telah memiliki dokumen perizinan berupa AMDAL/UKL-UPL dan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 73.810.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 38.216.800, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 51,77%.

5. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

Tidak ada kegiatan pengawasan kawasan konservasi yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2021.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 151.068.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 109.986.300, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 72,80%.

6. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Hasil kegiatan pengawasan di Triwulan III tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil pengawasan Unit Usaha yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak Triwulan III tahun 2021 lingkup Pangkalan Bitung.

No	Pelaku Usaha	Tanggal Pemeriksaan	Objek yang diawasi	Tempat Pelaksanaan	Hasil Pemeriksaan
1	Ratu Rosari 02 (Roman Sauring)	21 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Tenggara	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
2	Sumber Rizky 2018 (Alpian Manoso)	21 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Bolaang Mongondow	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
3	Hati (Serpi Makawimbang)	21 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Bolaang Mongondow Timur	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
4	Al Annur (Rudy Puili)	21 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Bolaang Mongondow Timur	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
5	Rembang (Rusdi Poiyo)	21 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Tenggara	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
6	Ratu 07 (Darwin Gobel)	21 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Tenggara	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
7	Citra Bahari 02 (Jefri Langi)	22 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Tenggara	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
8	Aliya (Alwi Pasay)	22 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Tenggara	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
9	Cemara 02 (Muhamad Gobel)	22 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Tenggara	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
10	Anugra (Sukri Mamonto)	22 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Tenggara	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
11	Alif 02 (Mansur Mahalipa)	22 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Tenggara	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
12	Nusantara 07 (Ramli mokoagow)	22 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa Tenggara	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
13	Rahmat 03 (Arif Ngalo)	22 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
14	Fauziah (Nawir Idris)	22 Juni 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Minahasa	Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing)
15	PM. Tanpa Nama (Kapal Biru; Laki-laki tidak diketahui namanya sebanyak 2 orang)	30 Agustus 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Desa Matano (03 12,559' LS - 122 26,093' BT)	PM. Tanpa Nama (Kapal Biru) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut.
16	PM. Tanpa Nama (Kapal Abu-Abu; Laki-laki tidak diketahui namanya sebanyak 2 orang)	30 Agustus 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Desa Tanjung Tiram (03 12,932' LS - 122 26,750' BT)	PM. Tanpa Nama (Kapal Abu-Abu) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut.

17	PM. Tanpa Nama (Kapal Merah Putih; Laki-laki tidak diketahui namanya sebanyak 2 orang)	30 Agustus 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Desa Tanjung Tiram (03 12,932' LS - 122 26,750' BT)	PM. Tanpa Nama (Kapal Merah-Putih) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut.
18	PM. Tanpa Nama (Asdar)	16 September 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar	PM. Tanpa Nama (Pelaku: Asdar) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut.
19	PM. Tanpa Nama (Agus)	16 September 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar	PM. Tanpa Nama (Pelaku: Agus) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut.
20	PM. Tanpa Nama (Muh. Hasbi)	16 September 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar	PM. Tanpa Nama (Pelaku: Muh. Hasbi) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut.
21	PM. Tanpa Nama (Samsul)	16 September 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar	PM. Tanpa Nama (Pelaku: Samsul) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut.
22	PM. Tanpa Nama (Warna Putih; Pelaku Laipo)	18 September 2021	Kapal penangkap ikan	Perairan Togong Potil dan Perairan Pulau Tiga	PM. Tanpa Nama (Pelaku: Laipo) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 77.700.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 48.985.500, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 63,04%.

Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Capaian Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan di dukung dengan IKU 2 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada Triwulan III tahun 2021 adalah 100%.

IKU2 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 dari target 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau). IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III tahun sebelumnya. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 808.583.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 446.238.196 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 55,18%.

Tabel 6. Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	2021	
		Target	Realisasi
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	persentase	100%	100%

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil agregasi capaian 4 (empat) kegiatan pengawasan sumber daya perikanan, yaitu:

- Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
- Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
- Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
- Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya.

Hasil capaian Triwulan III tahun 2021 keempat kegiatan pengawasan tersebut, sebagai berikut:

1. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan III tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap 24 Unit pengolahan ikan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dengan

tingkat presentase penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan 100%.

Pengawasan terhadap 24 (dua puluh empat) unit usaha pengolahan hasil perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7: Rincian Pemeriksaan Unit Pengolahan Ikan pada triwulan III

No	Nama perusahaan/ upi	Alamat perusahaan/ upi	NOMOR SIUP
1	PT. Sultratuna samudra	Kompleks pps kendari. Jl. Samudera no. 1 kel. Puday, kec. Abeli kendari	08.12.02.0125.6466
2	PT.harapan mujur samudera	Jl.samudera .kel.puday ,kec. Abeli ,kota kendari	8120107991289 DITETAPKAN TANGGAL 23 NOVEMBER 2020
3	UD. DY	Jl. Kel. Lompio, kecamatan banggai, kabupaten banggai	523.2/064/BUD/DPMPSTSP/2021 BERLAKU S.D TANGGAL 26 APRIL 2022
4	PT. Dharma samudra fishing industries	Jl. Yos sudarso no. 39 kendari, sulawesi tenggara	127/T/PERTANIAN/91
5	PT. Edco putra jaya	Kompleks pps kendari kavling 10 - jl. Samudera no. 1 kel. Puday kec. Abeli kota kendari	9120002100956 DIKELUARKAN PADA TANGGAL 05 JANUARI 2019
6	PT. Satya trinadi komira perkasa	Kompleks pps kendari kel. Puday kec. Abeli kota kendari	01.08.02.0198.5585
7	PT. Sartomo sakti	Jl. Samudera no. 1 kompleks pps kendari	02/SIUP-M/X/2011/026
8	UD. Ibrahim	Desa tinakin laut, kecamatan banggai, kabupaten banggai laut	570/503/15/DPMPSTSP/2019 BERLAKU S.D TANGGAL 07 MEI 2020
9	PT. Satya trinadi komira perkasa	Desa tinakin laut, kecamatan banggai, kabupaten banggai laut	523.2/063/BUD/DPMPSTSP/2021 MASA BERLAKU S.D 26 APRIL 2022
10	UD. Fzl	Desa lampa dusun iv, tinakin darat, kecamatan banggai , kabupaten banggai laut	570/503/46/DPMPSTSP/2019 BERLAKU S.D TANGGAL 29 OKTOBER 2020
11	PT. Mina Jaya Lestari	Kompleks pps kendari kel. Puday kec. Abeli kota kendari	9120508753203
12	UD. Aneka Laut	Jl. Poros nii tanasa kelurahan rapambinopaka kecamatan lalonggasumeeto kabupaten konawe	9120005982287
13	PT. Kelola Mina Laut	Kompleks pps kendari kel. Puday kec. Abeli kota kendari	39/DPMPSTSP/VI/2020
14	PT .Ome Trading Coy	Kompleks pps kendari kel. Puday kec. Abeli kota kendari	01/IZN/XI/2018/051
15	PT. Grahamakmur Ciptapratama	Jl. Poros toronipa desa tapulaga, kec. Soropia, kabupaten konawe	523/837/DPMPSTSP/VI/2021 DITETAPKAN TANGGAL 22 JUNI 2021
16	CV. Sinar Samudera	Jl. Durian no. 1, kel. Baru, kec. Palu barat, kota palu, sulawesi tengah	9120100492321 DITETAPKAN TANGGAL 22 APRIL 2019
17	CV. Tomini bay Seafood	Jl. Raya manado tomohon 79, kelurahan pineleng ii, kecamatan pineleng, kabupaten	503/DPMPSTSPD/68/SIUP/II/2021 DITETAPKAN TANGGAL 2 FEBRUARI 2021

		minahasa, provinsi sulawesi utara	
18	PT. Galesong	Jl. Baso dg bella no. 8, kelurahan kalukuang, kecamatan galesong, kabupaten takalar	151/D.11/PTSP/2020 BERLAKU S.D 13 SEPTEMBER 2021
19	PT. Nutrindo Fresfood Internasional	Jl. Lingkungan i, kel. Tanjung merah, kec. Matuari, kota bitung	8120004862383 DITETAPKAN TANGGAL 28 AGUSTUS 2018
20	UD. Berkah laipu	Lingkungan i, rt 003, kelurahan pinangunian, kecamatan aertembga, kota bitung	9120201942075 DITETAPKAN TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019
21	PT. Perikanan nusantara	Kelurahan aertembaga satu, kecamatan aertembaga, kota bitung	503/DPMPTSPD/1115/SIUP/XII/2020 TANGGAL 14 DESEMBER 2020
22	PT. Budi sentosa abadi	Jl. Samuel languyu no. 10, kelurahan aertembaga i, lingkungan ii kota bitung	8120001772714 DITETAPKAN TANGGAL 21 JULI 2018
23	Philips	Jl. Sungai pareman i no. 32 palopo, sulawesi selatan	154/IUMK/02.02/DPMPTSP/VIII/2019 TANGGAL 07 AGUSTUS 2019
24	Cakalang mas	Jl. Andi tenriadjeng no. 19, kelurahan pontap, kecamatan wara timur, kota palopo	9120107941792 DITETAPKAN TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 241.166.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 177.154.700, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 73,45%.

2. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya

Telah dilakukan pengawasan terhadap 6 (enam) unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya, dengan hasil presentase pemeriksaan kegiatan distribusi hasil perikanan capaiannya 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 : Rincian Pemeriksaan Unit Usaha yang melakukan Distribusi triwulan III

No	Nama Perusahaan/ UPI	Alamat Perusahaan/ UPI	Jenis Produk	Tujuan Pemasaran	Sarana Pengangkutan
1	PT. Grahamakmur Ciptapratama	Jl. Poros Toronipa Desa Tapulaga, Kec. Soropia, Kabupaten Konawe	Udang beku	Jepang	Kapal Laut
2	UD. Tomini Bay Seafood	Jl. Raya Manado Tomohon 79, Kelurahan Pineleng II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara	Tuna beku	Amerika	Kapal Laut
3	CV. Sakura Prima	Dusun Naukkaluku, Desa Lalattedong, Kec. Sendana, Kab. Majene, Sulawesi Barat	telur ikan terbang	Jepang	Kapal Laut
4	CV. Semangat Kawan Sejati Baru	Jl. Buru No. 46 Kota Makassar	Sirip Ikan Hiu Kering	Hongkong	Kapal Laut

5	CV. Golden KK	Jl. Baru Tugu Adipura No. 9, Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado	Tuna Segar	Singapura	Pesawat
6	CV. Tuna Bahari	Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa, Kelurahan Tumumpa Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado	Tuna Segar	Jepang	Pesawat
7	CV. Samudra Pangan Indonesia	Jl. Dumais Kelurahan Manembo Nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung	Tuna Segar	Jepang	Pesawat
8	PT. Perikanan Nusantara	Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung	Tuna Segar	Jepang	Pesawat
9	PT. Laut Biru Seafood	Jl. Lumba-lumba, Lingkungan IV, RT 01/ RW 04 Kelurahan Girian Bawah, Girian, Kota Bitung	Tuna beku	Amerika	Kapal Laut
10	CV. Ken Jaya Perkasa	Kauditan II, Kauditan, Minahasa Utara	Tuna beku	Australia	Pesawat
11	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Worang By Pass, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara	Tuna beku	Amerika	Kapal Laut
12	CV. Adi Tirta	Kompleks Pelabuhan Perikanan Untia, Jl. Salodong, Kelurahan Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar	Rumput Laut	China	Kapal Laut

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 87.200.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp. 29.491.700, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 33,82%.

3. Unit Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan III tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan <10 GT terhadap 6.673 Unit kapal perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung melalui aplikasi Simwaskan maupun belum menggunakan Simwaskan, pemeriksaan kapal perikanan melalui Simwaskan adalah 2.642 unit kapal perikanan, sedangkan yang belum menggunakan Simwaskan adalah 4.031 Unit kapal perikanan. dengan tingkat presentase penyelesaian pemeriksaan kapal perikanan 100%. Berdasarkan manual IKU pemeriksaan kapal perikanan yang masuk dalam hitungan capaian IKU ini adalah kapal perikanan <10 GT, sehingga kapal perikanan >10 GT yang telah diperiksa kepatuhannya tidak dimasukkan sebagai capaian IKU.

Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung belum seluruhnya menerapkan pelayanan kapal perikanan melalui aplikasi Simwaskan karena terkendala jaringan internet di beberapa Wilker PSDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Berikut ini adalah pemeriksaan kapal perikanan melalui Simwaskan dan yang belum menggunakan Simwaskan:

Tabel 9. Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya melalui Simwaskan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

No.	UPT/SATWAS/WILKER PSDKP	JUMLAH KAPAL PERIKANAN YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA MELALUI SIMWASKAN
1	Pangkalan PSDKP Bitung	637
2	Satwas SDKP Gorontalo	122
3	Satwas SDKP Gorontalo Utara	38
4	Satwas SDKP Kendari	363
5	Satwas SDKP Makassar	177
6	Satwas SDKP Mamuju	88
7	Satwas SDKP Takalar	382
8	Wilker PSDKP Donggala	77
9	Wilker PSDKP Minahasa Utara	37
10	Wilker PSDKP Selayar	18
11	Wilker PSDKP Sinjai	577
12	Wilker PSDKP Tumumpa	126
	JUMLAH	2.642

Tabel 10. Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya tidak melalui Simwaskan (Manual) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

No.	UPT/SATWAS/WILKER PSDKP	Kapal Perikanan yang Diperiksa Tidak Melalui Simwaskan (Manual)
1	Pangkalan PSDKP Bitung	643
2	Wilker PSDKP Amurang	9
3	Wilker PSDKP Belang (Mitra)	71
4	Wilker PSDKP Labuan Uki	47
5	Wilker PSDKP Kema (Minut)	47
6	Wilker PSDKP Tumumpa	136
7	Satwas. SDKP Gorontalo Utara	41
8	Wilker PSDKP Toli-toli	11
9	Satwas. SDKP Gorontalo	121
10	Wilker PSDKP Molibagu	45
11	Wilker PSDKP Parigi Moutong	31
12	Wilker PSDKP Tojo Una-una	31
13	Wilker PSDKP Boalemo	29
14	Wilker PSDKP Pohuwato	12
15	Satwas. SDKP Kendari	391
16	Wilker PSDKP Banggai	12
17	Wilker PSDKP Banggai Keplut	77
18	Wilker PSDKP Bau-bau	31
19	Wilker PSDKP Kolaka	15
20	Wilker PSDKP Pasar Wajo	30
21	Wilker PSDKP Torobulu	7

22	Wilker PSDKP Wakatobi	46
23	Satwas. SDKP Makassar	269
24	Wilker PSDKP Bone	238
25	Wilker PSDKP Palopo	14
26	Satwas. SDKP Takalar	398
27	Wilker PSDKP Bulukumba	186
28	Wilker PSDKP Selayar	24
29	Wilker PSDKP Sinjai	788
30	Satwas. SDKP Mamuju	88
31	Wilker PSDKP Donggala	87
32	Wilker PSDKP Majene	41
33	Wilker PSDKP Mamuju Utara	4
34	Wilker PSDKP Polman	11
Jumlah Unit Kapal Perikanan		3.849

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 480.217.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp. 239.591.796 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 49,89%.

4. Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya

Pengawasan unit pembudidayaan ikan pada triwulan III di lingkup Pangkajene Kepulauan PSDKP Bitung telah dilakukan pengawasan terhadap 24 (dua puluh empat) unit usaha pembudidayaan ikan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Pemeriksaan Unit Usaha Pembudidayaan Ikan pada Triwulan III

No.	Nama Perusahaan/Perorangan	Alamat/Alokasi Usaha	Jenis Usaha	Sistem Budidaya
1	PT MANAKARA SAKTI ABADI.	Dusun Urubanua, Desa Sarjo, Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu	payau	Tambak
2	PT. VANAME KASOLOANG SEJAHTERA.	Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat	payau	Tambak
3	POKDAKAN SALEKO MAMMESA	Dusun Saleko, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat	tawar	Kolam Air Tenang
4	PT. RANDOMAYANG TAMBAK LESTARI	Dusun Salunggaluku, Dusun Batio, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu	payau	Tambak
5	POKDAKAN MOAWOTA HELE	Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato	payau	Tambak
6	POKDAKAN AL HIJRAH	Dusun Upt, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato	payau	Tambak

7	PT. ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA	Jl. H. Andi Mappanyuki No. 9 & Kupa Desa Jalange, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru	payau	Kolam Air Tenang
8	ALIMUDIN JUJA	Desa Ilangata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara	payau	Tambak
9	KASMAWATI SAIN	Desa Popalo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara	payau	Tambak
10	SAIN KARIM	Desa Popalo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara	payau	Tambak
11	HAMZAH	Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo	payau	Tambak
12	AHMAD	Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara	payau	Tambak
13	POKDAKAN NOBY TARUNA REMAJA	Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo	tawar	Kolam Air Tenang
14	PT.SARANA HATCHERY ABADI	Bungung Pandang, Desa Mallasoro, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan	laut	Tambak
15	PT. CELEBES NEW HOPE,	Kompleks Marina Plaza Blok B No. 27 Kota Manado, Sulawesi Utara	laut	Tambak
16	CV. MUTIARA BANTAENG,	Kampung Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan	laut	Kolam Air Tenang
17	POKDAKAN BANDENG JAYA	Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah	payau	Tambak
18	PT. TUMPAAN MAKURI MANDIRI	Lingkungan li, Kel. Kinilow Satu, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon, Prov. Sulawesi Utara	laut	Tambak
19	PT. SINAR BARRU PRIMA,	Jl. Poros Pare-Pare Makassar, Jalange, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru	payau	Kolam Air Tenang, Tambak
20	SURYA SEAFOOD, CV.	Desa Winangun Atas, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa	laut	Kolam Air Tenang
21	H. ARMAN MAULANA	Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba	payau	Tambak
22	HERY LIOGU	Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa	tawar	Jaring Tancap

23	FRANS KARUNDENG	Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa	tawar	Jaring Tancap
24	UD. JEMS,	Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa	tawar	Jaring Tancap

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 163.952.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp. 43.974.996,- realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 26,82%.

Sasaran Kegiatan 3:

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat didukung oleh IKU Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

IKU3 PERSENTASE TINDAK LANJUT INFORMASI/ADUAN POKMASWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pelaksanaan tindak lanjut atas aduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung pada Triwulan III adalah satu aduan masyarakat. aduan tersebut terkait adanya aktifitas *destructive fishing*.

Menindaklanjuti Surat dari Bupati Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal Laporan terkait *Destructive Fishing* Nomor : 523/245/2021 tanggal 26 Juli 2021, terhadap Laporan/Pengaduan dengan cara pengeboman dan pembiusan ikan yang terjadi hampir cukup intens yang dilakukan oleh oknum nelayan tepatnya di sepanjang pesisir Perairan Laut Kabupaten Kolaka Utara, Pangkalan PSDKP Bitung melalui Satwas SDKP Kendari menindak lanjuti aduan tersebut dengan cara melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dilokasi Perairan Kab. Kolaka Utara. Berdasarkan fakta-fakta yang berasal dari Pengawas WP3K, Kepala Desa Kasumeeto Kecamatan Pakue dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara yang membidangi masalah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil, maka kami berkesimpulan sebagai berikut :

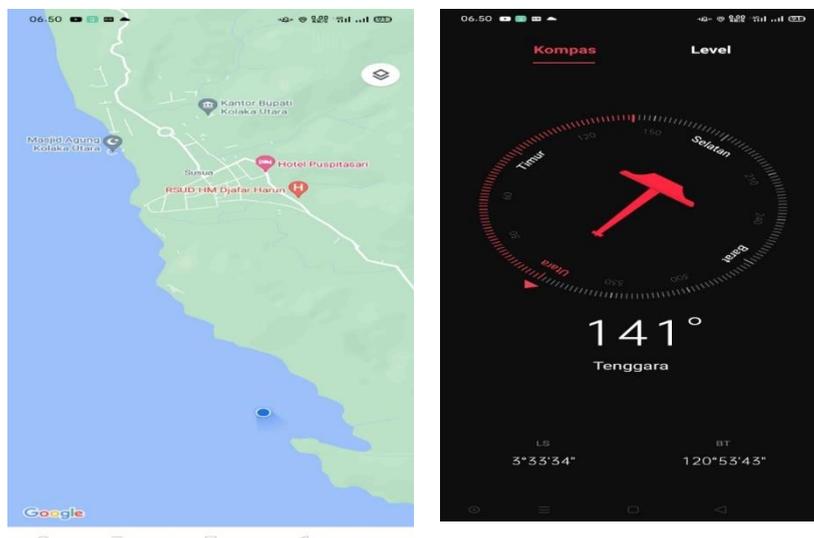
1. Bahwa memang benar di sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Kolaka Utara marak terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang telah berlangsung lama;
2. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap kegiatan pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di daerah menjadi tidak ada sehingga kegiatan Destructive Fishing merajalela serta dukungan anggaran operasional untuk kegiatan pengawasan di Kabupaten/Kota sudah tidak ada, baik yang bersumber dari DAK ataupun APBD;

3. Dari pihak Pengawas WP3K mengharapkan mereka diberikan sarana pengawasan seperti dibentuknya/dibangunnya Pos Pengawasan SDKP yang dimana untuk lahannya sendiri Pemerintah Daerah telah menyiapkan lokasi/lahan sejak Tahun 2016 untuk didirikannya Pos Pengawasan SDKP tersebut, Kamera jarak jauh (kamera DSLR) atau Drone untuk mendukung kegiatan pengawasannya, selama kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas WP3K sudah banyak pelaku DF yang diketahui profil pelaku-pelakunya, tempat tinggalnya (domisilinya), lokasi tempat biasa mereka melakukan kegiatan pemboman ikan, tinggal menyusun strategi bagaimana caranya agar para pelaku-pelaku tersebut bisa ditangkap, ditahan dan dikenai sanksi hukum yang berat agar ada efek jera yang dirasakan oleh para pelaku;
4. Bahwa Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan pembinaan/himbauan terhadap masyarakat nelayan tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkap terlarang (bahan peledak/bom ikan) baik dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar yang wilayahnya dijadikan tempat/lokasi pemboman ikan, sudah pasti akan mempengaruhi hasil pendapatan nelayan yang berakibat akan menurun serta dampak bagi pelaku pemboman ikan yang akan mengancam keselamatan jiwa pelakunya;
5. Bahwa kebutuhan ekonomi dan budaya masyarakat nelayan serta tidak adanya mata pencaharian alternatif sebagai pengganti sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nelayan menjadi penyebab terus terjadinya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang (handak/bom ikan) dan tidak memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta hanya mengejar keuntungan ekonomi sebesar-besarnya;
6. Bahwa dalam kegiatan operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang (handak/bom ikan) telah menimbulkan konflik sosial di masyarakat yang dikhawatirkan akan berdampak pada terjadinya ketidakstabilan keamanan dan meresahkan masyarakat serta berpotensi terjadinya kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya;

7. Bahwa perlunya dilakukan penegakan hukum secara optimal untuk memberikan efek jera dan menghilangkan kesan “pembiaran” oleh aparat penegak hukum terhadap aktivitas illegal fishing yang telah dilakukan oleh nelayan pebom ikan selama bertahun-tahun serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aktivitas penangkapan ikan yang telah dilakukannya merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum, namun tidak mengesampingkan bahwa mereka adalah masyarakat nelayan kecil;
8. Selain perlunya penegakan hukum yang optimal sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat nelayan yang sudah menjadi kebiasaan nelayan sejak dahulu mencari ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang (handak/bom ikan). Salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan adalah dengan mengganti alat tangkap terlarang dengan alat tangkap alternatif yang ramah lingkungan dan sosialisasi serta pendampingan intensif mengenai kerugian akibat penggunaan alat tangkap terlarang (handak/bom ikan) terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
9. Berdasarkan keadaan geografis sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Kolaka Utara ± 280 KM yang posisinya berhadapan langsung dengan Perairan Teluk Bone WPP-NRI 713, yang menjadikan daerah ini marak dengan kegiatan Destructive Fishing, untuk melaksanakan Patroli Pengawasan SDKP di daerah ini sebaiknya dilaksanakan pada saat musim-musim teduh antara bulan April – Oktober, dikarenakan pada waktu-waktu tertentu yakni musim Barat Nopember – Maret keadaan cuaca/gelombang di perairan ini cukup tinggi berkisar 2-4 m ketinggian gelombangnya, yang bisa mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan Patroli Pengawasan SDKP.

Gambar 3 Lokasi Tempat Penangkapan Ikan dengan Handak di Desa Pitu Lua, Dusun Labuan Dala Kecamatan Lasusua.



Gambar 4. Peninjauan Lapangan/Pemetaan Lokasi yang Menjadi Daerah Rawan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan)



Gambar 5. Keterangan Penanggulangan Destructive Fishing dari Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara, Pengawas WP3K, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 6 Wawancara dengan Kepala Desa Kasumeeto Kecamatan Pakue Terkait Maraknya Kegiatan Destructive



Capaian IKU ini diukur pada setiap Triwulan tahun 2021. Pangkalan PSDKP Bitung pada TW III 2021 sudah melaksanakan tindak lanjut terhadap satu aduan masyarakat, target capaian IKU tindak lanjut aduan masyarakat pada triwulan III adalah 71% dan capaian kinerja untuk IKU ini tercapai 100% sehingga capaian kinerja untuk IKU tindak lanjut aduan masyarakat ini tercapai 120%.

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 12.600.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp.12.000.000,- realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 95.24%

Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP

Capaian Sasaraan Kegiatan 5 Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

IKU4 PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU KAPAL PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 dari target

1,07% tercapai 1,89% dengan persentase capaian kinerja 120% (Hijau).

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 9.228.121.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 7.540.017.953 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 81,70%.

Tabel 12. Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan III Tahun 2021

UPT PSDKP	Kapal Pengawas	Total Hari	Jam Operasi (jam) (t)	Kecepatan Dinas (NM/jam) (V)	Jangkauan Efektif Radar (NM) (d)	Faktor Koreksi WPP (Fwpp)	Faktor Koreksi Kapal (Fkp)	Cakupan (Xkp) NM2 (d.V.t.Fwpp.Fkp)	% Cakupan
Pangkalan PSDKP Bitung	Hiu 02	127	973,1	15	15	0,40	0,20	17.515,80	0,91%
	Hiu 05	113	1053	15	15	0,40	0,20	18.954,00	0,98%
Persentase capaian Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan III Tahun 2021									1,89%

IKU5 PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. pada Triwulan III tahun 2021 dari target 0,40% tercapai 0,47% dengan persentase capaian kinerja 117,50% (Hijau).

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 1.770.720.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 1.488.105.530 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 84,04%.

Tabel 13. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021

No.	NAMA KAPAL	Hari Operasi (hari)	Lama Waktu Pengawasan (jam)	Faktor Koreksi Speedboat (Fsb)	Cakupan (Xsb) (NM2)	Luas WPPNRI (NM2)	Cakupan (%)
			t	Fsb	d*v*t*Fsb	A	X/A
1	Albacore 01	34	155	0,1	620	1.928.506	0,0321%
2	Dolphin 03	21	114	0,1	456	1.928.506	0,0236%
3	Dolphin 19	20	124,2	0,1	497	1.928.506	0,0258%
4	Dolphin 26	21	117	0,1	468	1.928.506	0,0243%
5	Napoleon 30	32	246	0,1	984	1.928.506	0,0510%
6	Napoleon 31	32	226	0,1	904	1.928.506	0,0469%
7	Napoleon 56	21	105	0,1	420	1.928.506	0,0218%
8	RIB/Sea Rider 06	32	157	0,1	628	1.928.506	0,0326%
9	Rubber Boat Bone	21	111	0,1	444	1.928.506	0,0230%

10	Rubber Boat Kendari	20	110	0,1	440	1.928.506	0,0228%
11	Rubber Boat Luwuk Banggai	20	90	0,1	360	1.928.506	0,0187%
12	Rubber Boat Mamuju Utara	20	109,8	0,1	439	1.928.506	0,0228%
13	Rubber Boat Pangkejene Kepulauan	32	266	0,1	1064	1.928.506	0,0552%
14	Rubber Boat Selayar	21	109	0,1	436	1.928.506	0,0226%
15	Rubber Boat Takalar	18	85,1	0,1	340	1.928.506	0,0177%
16	Rubber Boat Wakatobi	23	117	0,1	468	1.928.506	0,0243%
Total		388	2242,1				0,47%

**Sasaran Kegiatan 5 :
Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP**

Capaian Sasaraan Kegiatan 5 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP di dukung dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

IKU6 PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini, capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2021.

**Sasaran Kegiatan 6:
Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan**

IKU7 PERSENTASE PENYELESAIAN PENYIDIKAN TPKP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung telah menangani 26 Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. 19 (sembilan belas) Perkara sudah dinyatakan Inkracht, 2 (dua) Perkara Tahap II, 5 (lima) Perkara dalam proses penyidikan. Capaian kinerja untuk IKU ini adalah 99,03% dari target kinerja 65% di Triwulan III sehingga nilai capaian kinerja untuk IKU ini adalah 120% (Hijau).

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 423.405.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 290.819.850 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 68,68%.

Tabel 14. Penanganan TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

NO	NAMA TERSANGKA	PROSES HUKUM	NOMOR SPRINDIK	NOMOR SPDP	NOMOR P-21	Tahap II
1	AL IMRAN	Inkracht	Print.Sidik.01/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	B-117/ P.4.4/Eku.1/ 01/2021	121/Lan.5/PW.510/ I/2021
2	RIKIANTO	Inkracht	Print.Sidik.02/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	B-124/ P.4.4/Eku.1/ 01/2021	122/Lan.5/PW.510/ I/2021
3	ARDIANSYAH	Inkracht	Print.Sidik.03/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	1846/PPNS-Lan.5/PW.510/XII/2020	B-123/ P.4.4/Eku.1/ 01/2021	123/Lan.5/PW.510/ I/2021
4	RAHMAN alias JUMRIN	Inkracht	Print.Sidik.04/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	7/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021	B-510/ P.3.4/Eku.1/ 02/2021	505/Lan.5/PW.510/ III/2021
5	SUDIRMAN alias DIRMAN	Inkracht	Print.Sidik.05/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	7/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021	B-509/ P.3.4/Eku.1/ 02/2021	506/Lan.5/PW.510/ III/2021
6	MUDDING	Inkracht	Print.Sidik.06/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	226/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021	B-563/ P.3.4/Eku.1/ 03/2021	510/Lan.5/PW.510/ III/2021
7	JUMASRI Alias MABE	Inkracht	Print.Sidik.07/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	227/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021	B-565/ P.3.4/Eku.1/ 03/2021	508/Lan.5/PW.510/ III/2021
8	ANWAR Alias ALO	Inkracht	Print.Sidik.08/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	228/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021	B-561/ P.3.4/Eku.1/ 03/2021	509/Lan.5/PW.510/ III/2021
9	M A N I R	Inkracht	Print.Sidik.09/PPNS-Lan.5/PW.510/II/2021	229/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021	B-560/ P.3.4/Eku.1/ 03/2021	507/Lan.5/PW.510/ III/2021
10	BADWI	Inkracht	Print.Sidik.10/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	471/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021	B-577/ P.2.4/Eku.2/03/2021	10/PPNS-Lan.5/PP.510/ IV/2021
11	MOHAMAD	Inkracht	Print.Sidik.11/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	472/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021	B-580/ P.2.4/Eku.2/03/2021	11/PPNS-Lan.5/PP.510/ IV/2021
12	ANAS alias MOHAMAD ALANG	Inkracht	Print.Sidik.12/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	473/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021	B-579/ P.2.4/Eku.2/03/2021	12/PPNS-Lan.5/PP.510/ IV/2021
13	ANDI bin ARIADI	Inkracht	Print.Sidik.13/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	505/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021	B-578/ P.2.4/Eku.2/03/2021	13/PPNS-Lan.5/PP.510/ IV/2021
14	KAPTO KAILI	Inkracht	Print.Sidik.14/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	681/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021	B-591/P.2.18/Eku.1/05/2021	1325/Lan.5/PW.510/ VI/2021
15	IKBAL K	Inkracht	Print.Sidik.15/PPNS-Lan.5/PW.510/III/2021	681/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021	B-591/P.2.18/Eku.1/05/2021	1326/Lan.5/PW.510/ VI/2021
16	IRWAN THIHA alias IWAN	Inkracht	Print.Sidik.16/PPNS-Lan.5/PW.510/IV/2021	851/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021	B-419/P.2.15.3/Eku.1/06/2021	1437/Lan.5/PW.510/ VI/2021
17	SARTO B. MALA	Inkracht	Print.Sidik.17/PPNS-Lan.5/PW.510/IV/2021	852/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021	B-418/P.2.15.3/Eku.1/06/2021	1438/Lan.5/PW.510/ VI/2021
18	ABD AZIZ DG SATTU Alias TISON	Inkracht	Print.Sidik.18/PPNS-Lan.5/PW.510/IV/2021	838/PPNS-Lan.5/ PW.510/IV/2021	B-420/P.2.15.3/Eku.1/06/2021	1439/Lan.5/PW.510/ VI/2021
19	FEBSON MAHALING KAMANSING	SIDANG	Print.Sidik.19/PPNS-Lan.5/PW.510/VI/2021	1444/PPNS-Lan.5/ PW.510/VI/2021	B-1782/P.1.14\4.3/Eku.1/07/2021	1795/PPNS-Lan.5/PW.510/ VIII/2021
20	JORGE QUIUSTO	SIDANG	Print.Sidik.20/PPNS-Lan.5/PW.510/VI/2021	1543/PPNS-Lan.5/ PW.510/VI/2021	B-2003/P.1.14\4.3/Eku.1/08/2021	2097/PPNS-Lan.5/PW.510/ IX/2021

21	GILBERT ADVENTAJADO	Inkracht	Print.Sidik.21/PPNS-Lan.5/PW.510/VI/2021	1544/PPNS-Lan.5/PW.510/VI/2021	B-1781/P.1.14\4.3/Eku.1/07/2021	1871/PPNS-Lan.5/PW.510/VIII/2021
22	ASDAR	TAHAP I	Print.Sidik.22/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021	2109/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021	-	-
23	AGUS	TAHAP I	Print.Sidik.23/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021	2112/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021	-	-
24	MUH. HASBI	TAHAP I	Print.Sidik.24/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021	2113/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021	-	-
25	SAMSUL	TAHAP I	Print.Sidik.25/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021	2114/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021	-	-
26	LAIPO	TAHAP I	Print.Sidik.26/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021	2138/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021	-	-

IKU8 PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Telah dilakukan penanganan barang bukti dan awak kapal di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III 2021 sebanyak 19 Barang Bukti Kapal Perikanan dan 107 Awak Kapal dengan capaian persentase IKU ini adalah 99,36% dari target Triwulan III 93% sehingga nilai capaian kinerja IKU ini adalah 106,84% (Hijau).

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 243.500.000,- dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 111.630.000, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 45,84%.

Tabel 15. Penanganan Barang Bukti TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

NO.	FOTO BARANG BUKTI	NAMA BARANG BUKTI		NAMA TERSANGKA & KEWARGANEGARAAN		PROSES HUKUM	KETERANGAN
		NAMA	GT	NAMA	KEWARGA-NEGARAAN		
1		Tanpa Nama	1	AL IMRAN	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
2		KMN. INKAMINA-222/ TRIPLE 2	30	Rahman alias Jumrin	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik

3		Tanpa Nama	1	Mudding	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
4		Tanpa Nama	1	Jumasri alias Mabe	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
5		Tanpa Nama	1	Manir	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
6		Tanpa Nama	1	Anwar alias Allo	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
7		KM. Kemitraan Daerah Tertinggal 01/ KPDT Kendari 01	37	Badwi	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
8		KM. Tomini Sejahtera	20	Mohamad	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
9		KM. Inka Mina - 742	34	Anas Bin Mohammad Alang	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
10		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Andi Bin Ariadi	Indonesia	INKRACHT	Rampas Negara
11		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Kapto Kaili, dkk.	Indonesia	INKRACHT	Rampas Negara
12		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Irwan Thiha	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
13		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Sarto B. Mala	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
14		INKA MINA 746	34	Abd Aziz Dg Sattu	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik

15		FB.LB JUAN PAOLO UNO	40	FEBSON M. KAMANSING	FILIPINA	PENYIDIKAN	Proses Penyidikan
16		Fbca YAYA - 3	30	JORGE QUISTO	FILIPINA	PENYIDIKAN	Proses Penyidikan
17		KASIH 03	2	Gilbert Adventajado	Indonesia	INKRACHT	Di kembalikan ke pemilik
18		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Asdar Bin Pa'a	Indonesia	PENYIDIKAN	Proses Penyidikan
19		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Laipo	Indonesia	PENYIDIKAN	Proses Penyidikan

Tabel 16. Penanganan AWAK KAPAL di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

No	NAMA KAPAL	NAMA AWAK KAPAL	WARGA NEGARA	STATUS	Tahap II
1	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	AL IMRAN	INDONESIA	TERSANGKA	121/Lan.5/PW.510/I/2021
2		RIKIANTO	INDONESIA	TERSANGKA	122/Lan.5/PW.510/I/2021
3		ARDIANSYAH	INDONESIA	TERSANGKA	123/Lan.5/PW.510/I/2021
4	KM. INKAMINA 222/TRIPLE 2	RAHMAN alias JUMRIN	INDONESIA	TERSANGKA	505/Lan.5/PW.510/III/2021
5		SUDIRMAN alias DIRMAN	INDONESIA	TERSANGKA	506/Lan.5/PW.510/III/2021
6		TISON	INDONESIA	SAKSI	Dikembalikan ke pihak keluarga
7		ARIF GADO	INDONESIA	SAKSI	
8		ABDUL MALIK UTULI	INDONESIA	NON JUSTICIA	
9		RUSTAM	INDONESIA	NON JUSTICIA	
10		RIZAL PRADITIA	INDONESIA	NON JUSTICIA	
11		HAENDRA WAHYUDI R.	INDONESIA	NON JUSTICIA	
12		SHARUDIN SALAWIALI	INDONESIA	NON JUSTICIA	
13		KAISAR	INDONESIA	NON JUSTICIA	
14		RIDWAN UTULI	INDONESIA	NON JUSTICIA	
15		ZUL FAHRIN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
16		HENDRA GUNAWAN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
17		FAISAL ADRIMAN MAHAUDIN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
18		INDRAWAN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
19		ACO DILA HAPA	INDONESIA	NON JUSTICIA	

20		TAKWA	INDONESIA	NON JUSTICIA	
21		ARIFIN T. RACHMAN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
22		AMAN PAKAYA	INDONESIA	NON JUSTICIA	
23	PERAHU TANPA NAMA	MUDDING	INDONESIA	TERSANGKA	510/Lan.5/PW.510/III/2021
24	PERAHU TANPA NAMA	JUMASRI	INDONESIA	TERSANGKA	508/Lan.5/PW.510/III/2021
25	PERAHU TANPA NAMA	ANWAR alias ALO	INDONESIA	TERSANGKA	509/Lan.5/PW.510/III/2021
26	PERAHU TANPA NAMA	MANIR	INDONESIA	TERSANGKA	507/Lan.5/PW.510/III/2021
27	KM. KEMITRAAN DAERAH TERTINGGAL 01/KPDT KENDARI 01	BADWI	INDONESIA	TERSANGKA	10/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021
28		IRMAN ATUKA	INDONESIA	SAKSI	Dikembalikan ke pihak keluarga
29		SAKIR	INDONESIA	SAKSI	
30		ARJUN IGIRISA	INDONESIA	NON JUSTICIA	
31		ABDUL RAHMAN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
32		HENDRA GUNAWAN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
33		ANTO	INDONESIA	NON JUSTICIA	
34		MUSRAN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
35		FARID MALUSINA	INDONESIA	NON JUSTICIA	
36		HERMANSYAH	INDONESIA	NON JUSTICIA	
37	FADLI	INDONESIA	NON JUSTICIA		
38	KM. TOMINI SEJAHTERA	MOHAMAD	INDONESIA	TERSANGKA	11/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021
39		ALAMSYAH DJ. HANO	INDONESIA	SAKSI	Dikembalikan ke pihak keluarga
40		ABD. RAHMAN	INDONESIA	SAKSI	
41		FAHRUL TONGGOLO	INDONESIA	NON JUSTICIA	
42		RUSLAN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
43		USMAN RAHIM	INDONESIA	NON JUSTICIA	
44		ZAENAL	INDONESIA	NON JUSTICIA	
45		FADLI	INDONESIA	NON JUSTICIA	
46		ASTAR	INDONESIA	NON JUSTICIA	
47		JUNAIDI	INDONESIA	NON JUSTICIA	
48	SYAIFUDIN	INDONESIA	NON JUSTICIA		
49	ASMAL	INDONESIA	NON JUSTICIA		
50	KM. INKA MINA 742	ANAS BIN MOHAMMAD ALANG	INDONESIA	TERSANGKA	12/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021
51		ARDIANTO	INDONESIA	SAKSI	Dikembalikan ke pihak keluarga
52		ARWAN A.	INDONESIA	SAKSI	
53		SAHRIL	INDONESIA	NON JUSTICIA	
54		DIRWANTO	INDONESIA	NON JUSTICIA	
55		ARMAN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
56		FAISAL	INDONESIA	NON JUSTICIA	
57		BAHTIAR	INDONESIA	NON JUSTICIA	
58		ASRI A. ASRIN TING	INDONESIA	NON JUSTICIA	
59		SAIPUL	INDONESIA	NON JUSTICIA	
60		ADI KURNIAWAN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
61		BAGONG	INDONESIA	NON JUSTICIA	
62		GUNAWAN MUH. GUNTUR	INDONESIA	NON JUSTICIA	

63		KAISAR	INDONESIA	NON JUSTICIA	
64		DARWIS	INDONESIA	NON JUSTICIA	
65		MULIADI	INDONESIA	NON JUSTICIA	
66		HAMDAR HATTAB HADDAD	INDONESIA	NON JUSTICIA	
67		ASRUN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
68		RAMDAN LAMELE	INDONESIA	NON JUSTICIA	
69	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	ANDI BIN ARIADI	INDONESIA	TERSANGKA	13/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021
70	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	KAPTO KAILI	INDONESIA	TERSANGKA	1325/Lan.5/PW.510/VI/2021
71	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	IKBAL K	INDONESIA	TERSANGKA	1326/Lan.5/PW.510/VI/2021
72	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	IRWAN THIHA alias IWAN	INDONESIA	TERSANGKA	1438/PPNS-Lan.5/PW.520/VI/2021
73	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	SARTO B. MALA	INDONESIA	TERSANGKA	1439/PPNS-Lan.5/PW.520/VI/2021
74	KM. INKAMINA 746	ABD. AZIS DG. SATTU alias TISON	INDONESIA	TERSANGKA	1437/PPNS-Lan.5/PW.520/VI/2021
75		ARWIS	INDONESIA	SAKSI	Dikembalikan ke pihak keluarga
76		FAISAL H. LATTA	INDONESIA	SAKSI	
77		TARZAN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
78		LA USA	INDONESIA	NON JUSTICIA	
79		UCOK	INDONESIA	NON JUSTICIA	
80		MAMING	INDONESIA	NON JUSTICIA	
81		KIWA	INDONESIA	NON JUSTICIA	
82		KIAN	INDONESIA	NON JUSTICIA	
83		MARLON	INDONESIA	NON JUSTICIA	
84		TAYUNG	INDONESIA	NON JUSTICIA	
85		LASO	INDONESIA	NON JUSTICIA	
86	WAWAN	INDONESIA	NON JUSTICIA		
87	FB. LB. JUAN PAOLO UNO	FEBSON MAHALING KAMANSING	FILIPINA	TERSANGKA	1795/PPNS- Lan.5/PW.520/VIII/2021
88		RUEL FLORES BERO	FILIPINA	SAKSI	Sudah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Bitung pada tanggal 6 September 2021, Nomor : 2042/PSDKPLan.5/PW.532/IX/2021
89		JULIANO ANTIN ABIL JR.	FILIPINA	SAKSI	
90		TIMIE DULAR DIGAM	FILIPINA	NON JUSTICIA	Sudah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Bitung pada tanggal 28 Juli 2021, Nomor : 1716/Lan.5/PW.532/VII/2021
91	FBca. YAYA-3	JORGE QUISTO	FILIPINA	TERSANGKA	2097/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021
92		NILO MAGALLIANES	FILIPINA	SAKSI	Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung
93		NICK M. TRASPORTE	FILIPINA	SAKSI	
94		MARIO PACULBA	FILIPINA	NON JUSTICIA	Sudah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Bitung pada tanggal 28 Juli 2021, Nomor : 1716/Lan.5/PW.532/VII/2021
95		JERSON N. CONGCONG	FILIPINA	NON JUSTICIA	
96	KM. KASIH 03	GILBERT ADVENTAJADO	INDONESIA	TERSANGKA	1871/PPNS- Lan.5/PW.520/VIII/2021

97		DANILO LABOJO, JR	FILIPINA	SAKSI	Sudah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Bitung pada tanggal 6 September 2021, Nomor : 2042/PSDKPLan.5/PW.532/IX/2021
98		LINDON LABAJO	FILIPINA	SAKSI	
99		GASPAR LABAJO	FILIPINA	NON JUSTICIA	Sudah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Bitung pada tanggal 28 Juli 2021, Nomor : 1716/Lan.5/PW.532/VII/2021
100		JANIL LABAJO	FILIPINA	NON JUSTICIA	
101		JUNRY LABAJO	FILIPINA	NON JUSTICIA	
102		DANILO LABOJO, SR	FILIPINA	NON JUSTICIA	
103	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	ASDAR	INDONESIA	TERSANGKA	PROSES PENYIDIKAN
104		AGUS	INDONESIA	TERSANGKA	PROSES PENYIDIKAN
105		MUH. HASBI	INDONESIA	TERSANGKA	PROSES PENYIDIKAN
106		SAMSUL	INDONESIA	TERSANGKA	PROSES PENYIDIKAN
107	PERAHU MOTOR TANPA NAMA	LAIPO	INDONESIA	TERSANGKA	PROSES PENYIDIKAN

Sasaran Kegiatan 7:

Tata kelola pemerintahan yang baik

Capaian Sasaran Kegiatan 7 Tata kelola pemerintahan yang baik di dukung dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu, dengan rincian sebagai berikut:

IKU9 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SLO (SURAT LAIK OPERASI) KAPAL PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2021, hasil dari survey kepuasan masyarakat terhadap pengguna layanan SLO dilaksanakan melalui media eletronik diseluruh wilayah kerja pangkalan PSDKP Bitung sampai ke Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Hasil survey pada Triwulan III tahun 2021 adalah 88,68% dari target di Triwulan III adalah 80 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunaan layanan SLO adalah 110,85% (hijau) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan SLO TW III tahun 2021

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3.627	sangat baik	0.403	90.678
U2	Prosedur	3.483	sangat baik	0.387	88.983
U3	Waktu Pelayanan	3.407	sangat baik	0.378	85.169
U4	Biaya/Tarif	3.729	sangat baik	0.414	100.000
U5	Produk Layanan	3.458	sangat baik	0.384	86.441
U6	Kompetensi Pelaksana	3.551	sangat baik	0.394	89.831
U7	Perilaku Pelaksana	3.508	sangat baik	0.389	87.712
U8	Sarana dan Prasarana	3.449	sangat baik	0.383	78.814
U9	Pengaduan Masyarakat	3.746	sangat baik	0.416	93.644
Rata - Rata Semua Unsur				3.547	

Keterangan :

- U1 s.d. U9	= Unsur-Unsur Pelayanan
- NRR	= Nilai rata-rata
- IKR	= Indeks Kepuasan Responden
- *)	= Jumlah NRR IKR tertimbang
-**)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang per unsur	= NRR per unsur x 0,111

IKR TERHADAP RSS :

88.68

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Memuaskan)	: 81,26 - 100,00
B (Memuaskan)	: 62,51 - 81,25
C (Kurang Memuaskan)	: 43,76 - 62,50
D (Tidak Memuaskan)	: 25,00 - 43,75

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 19.050.000,- dan belum ada realisasi sampai dengan bulan September 2021, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 0%, hal ini karena pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat pada TW I, TW II dan TW III dilaksanakan hanya menggunakan kuisisioner media elektronik sehingga belum ada realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan IKM pengguna layanan SLO pada lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Anggaran tersebut disiapkan untuk menunjang kegiatan IKM dan konsultasi Publik yang rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2021.

IKU10 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN LVHPI

(LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENANGKAPAN IKAN) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2021, hasil dari survey kepuasan masyarakat terhadap pengguna layanan LVHPI dilaksanakan melalui media elektronik diseluruh wilayah kerja pangkalan PSDKP Bitung sampai ke Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Hasil survey pada Triwulan III tahun 2021 adalah 86,43 dari target di Triwulan III adalah 80 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunaan layanan LVHPI adalah 108,04% (hijau) dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 18. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan LVHPI TWIII tahun 2021

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3.400	sangat baik	0.377	85.000
U2	Prosedur	3.378	sangat baik	0.375	86.667
U3	Waktu Pelayanan	3.289	sangat baik	0.365	82.222
U4	Biaya/Tarif	3.689	sangat baik	0.409	100.000
U5	Produk Layanan	3.378	sangat baik	0.375	84.444
U6	Kompetensi Pelaksana	3.467	sangat baik	0.385	85.556
U7	Perilaku Pelaksana	3.511	sangat baik	0.390	87.778
U8	Sarana dan Prasarana	3.389	sangat baik	0.376	78.333
U9	Pengaduan Masyarakat	3.644	sangat baik	0.405	91.111
Rata - Rata Semua Unsur				3.457	
Keterangan :					
- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur Pelayanan					
- NRR = Nilai rata-rata					
- IKR = Indeks Kepuasan Responden					
- *) = Jumlah NRR IKR tertimbang					
-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25					
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi					
NRR tertimbang perunsur = NRR per unsur x 0,111					
IKR TERHADAP RSS :				86.43	
Mutu Pelayanan :					
A (Sangat Memuaskan) : 81,26 - 100,00					
B (Memuaskan) : 62,51 - 81,25					
C (Kurang Memuaskan) : 43,76 - 62,50					
D (Tidak Memuaskan) : 25,00 - 43,75					

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 19.050.000,- dan belum ada realisasi sampai dengan bulan September 2021, Laporan Kinerja Triwulan III 2021 **PANGKALAN PSDKP BITUNG**

realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 0%, hal ini karena pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat pada TW I, TW II dan TW III dilaksanakan hanya menggunakan kuisioner media elektronik sehingga belum ada realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan IKM pengguna layanan LVHPI pada lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Anggaran tersebut disiapkan untuk menunjang kegiatan IKM dan konsultasi Publik yang rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2021.

IKU11 NILAI WBK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, pengukuran IKU ini akan dilakukan pada TW IV 2021.

IKU12 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, pengukuran IKU ini akan dilakukan pada TW IV 2021.

IKU13 NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.

IKU14 INOVASI GUGUS KERJA TRANSFORMASI YANG DIHASILKAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.

IKU15 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021..

IKU16 TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021 .

IKU17 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian IKU ini di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan III tahun 2021 adalah 99,33%, dari target Triwulan III 2021 di Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 84%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini adalah 118,25 % (Hijau).

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 11.327.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp.4.731.000,- realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 41,76%.

**IKU18 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, pengukuran IKU ini akan dilakukan pada TW IV 2021.

**IKU19 NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP
BITUNG**

Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Pagu anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 setelah Revisi ke-6 dan Refocusing ke-4 adalah Rp. **34.400.123.000** dengan persentase realisasi anggaran sebesar 70,93%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan III Tahun 2021

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2350 Pemantauan , Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	13.437.823.000	10.345.350.450	76.99
2.	2351 Penyelesaian TPKP	763.705.000	465.585.559	60.96
3.	2352 Operasional Pengawasan SDK	472.514.000	297.628.750	62.99
4.	2353 Operasional Pengawasan SDP	808.583.000	446.238.196	55.19
5.	2355 Dukungan Manajemen	18.917.498.000	12.845.665.059	67.90
Total		34.400.123.000	24.400.468.014	70.93

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah Ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah Ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 7 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 112. 19 Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 11 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) dan 8 Indikator Kinerja belum dapat di nilai karena baru akan di ukur capaian kinerjanya pada Triwulan IV tahun 2021. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 dapat tercapai semuanya.

4.2. Rekomendasi

Saran

Dalam rangka perbaikan pencapaian indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan IV tahun 2021, perlu dilakukan peningkatan terhadap capaian kinerja yang belum mencapai nilai maksimal, hal tersebut guna meningkatkan nilai capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

Rencana Tindaklanjut

Melakukan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja pada Triwulan IV tahun 2021 secara terarah dan terukur.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung
Triwulan I Tahun 2021